

ABSTRAK

Hasna Afifah .H (01656220001)

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PEMBATALAN HAK ATAS MEREK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

(x + 107 halaman)

Pemegang merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek terdaftar yang serupa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek. Gugatan ini harus diajukan dalam waktu 5 tahun sejak pendaftaran merek. Namun, tidak ada batasan waktu jika terdapat itikad buruk atau pelanggaran terhadap ideologi negara, hukum, moralitas, agama, atau ketertiban umum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat membatalkan pendaftaran merek berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan mencantumkan alasan dan tanggal pembatalan. Pemilik merek kemudian diberitahu secara tertulis, dan sertifikat merek dinyatakan tidak berlaku. Tanggung jawab pemerintah atas kerugian yang timbul akibat pembatalan merek dimulai dari menerima permohonan pendaftaran hingga melaksanakan pembatalan yang diperintahkan pengadilan setelah memperoleh salinan resmi keputusan final. Menerbitkan daftar Merek Terkenal dapat membantu Pemeriksa Merek mengurangi subjektivitas selama pemeriksaan.

Referensi : 44 (2001-2024)

Kata Kunci : Merek Terkenal, Tanggung Jawab, DJKI, Pemeriksa Merek

ABSTRACT

Hasna Afifah .H (01656220001)

GOVERNMENT RESPONSIBILITY FOR THE CANCELLATION OF TRADEMARK RIGHTS BASED ON COURT DECISION

(x + 107 pages)

The holder of a famous trademark can file a trademark cancellation lawsuit against a similar registered trademark under Article 76 paragraph (1) of the Trademark Law. This lawsuit must be filed within 5 years of the trademark's registration. However, there is no time limit if bad faith or violations of state ideology, laws, morality, religion, or public order are involved. The Minister of Law and Human Rights can cancel the trademark registration based on a court decision with permanent legal force, marking the reason and date of cancellation. The trademark owner is then notified in writing, and the trademark certificate is declared invalid.

The government's responsibility for losses incurred from trademark cancellation extends from receiving the registration application to implementing the court-ordered cancellation after obtaining an official copy of the final decision. Issuing a list of Famous Trademarks can help Trademark Examiners reduce subjectivity during examinations.

Reference : 44 (2001-2024)

Keywords : Famous Brand, Responsibility, DJKI, Brand Examiner

